

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan bebas yang dimulai tahun 2003 melalui *ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)* dan dilanjutkan dengan kerangka *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 2010 bagi Negara maju, menuntut setiap Negara untuk lebih kompetitif dalam menjalankan roda perekonomiannya serta harus di dukung oleh sektor moneter yang kuat serta mempunyai arah yang jelas.

Perubahan yang sangat mendasar terjadi pada dunia perbankan dimulai sejak lahirnya paket deregulasi 1 juni 1983 yang antara lain memberikan kebebasan kepada dunia keuangan dan perbankan di Indonesia untuk sistem pagu kredit, pengurangan secara bertahap untuk kredit likuiditas bank Indonesia, juga diperkenalkannya instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia sebagai alternatif dalam pengendalian likuiditas, perubahan di bidang keuangan dan perbankan tersebut semakin besar lagi dengan lahirnya paket deregulasi 27 Oktober 1988 sebagai tindak lanjut dari paket deregulasi 1 Juni 1988 yang antara lain mengatur masalah pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka, kemudahan dalam perubahan kantor Bank, pendirian Bank Swasta dan Bank campuran yang baru, serta pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang baru. Paket deregulasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan dana masyarakat serta mendorong pengembangan pasar modal dan menunjang peningkatan ekspor non migas.

Sasaran pokok deregulasi perbankan ini pada prinsipnya dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kemampuan Bank menghimpun dana dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan agar perbankan dapat lebih mandiri dan tidak tergantung dari dukungan Bank Indonesia dalam hal pendanaannya, mendorong efisiensi perbankan melalui kompetensi yang sehat dan mengurangi peranan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Menurut undang-undang RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No.10 Tahun 1998, tugas pokok perbankan adalah untuk menghimpun dana masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Bank diharapkan mampu menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam perkembangannya sejak diberlakukannya Pakto 1988, dunia perbankan di Indonesia tumbuh pesat, yang ditandai dengan bertambah banyaknya jumlah Bank. Hal ini tentu menimbulkan persaingan yang ketat diantara bank-bank tersebut, sehingga mereka banyak memberikan kemudahan dengan maksud meningkatkan pelayanan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tersebut dari perkiraan-perkiraan akan resiko menjadi rendah. Dalam hal ini peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank terutama posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut jenis penggunaannya. Agar masyarakat tetap percaya pada Bank maka Bank harus memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan prinsip kehati-hatian yang perlu diupayakan semaksimal mungkin sebab sasaran pemberian kredit tidak akan tercapai jika tidak realistis dan pengelolaannya tidak didasarkan pada efisiensi.

Di Indonesia Kredit program pernah menjadi salah satu sistem pembiayaan UKM sampai dihentikannya sistem ini pada sekitar tahun 2000. Pada masa itu tercipta berbagai skim kredit untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan. Asumsi yang digunakan yaitu kemampuan modal dan bisnis UKM masih terbatas sehingga belum kuat untuk bersaing.

Pemberian kemudahan dan keringanan dalam bentuk kredit berbunga lunak (subsidi) dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UKM. Ragam kredit program cukup banyak, mulai dari kredit lunak di bidang pertanian seperti kredit usaha tani (KUT), kredit intensifikasi tambak, kredit perunggasan, kredit sapi perah, kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA), serta berbagai skim kredit lunak lainnya.

Sejalan dengan implementasi kebijakan pengurangan subsidi termasuk subsidi untuk kredit, maka berbagai kredit program dihapuskan. Dalam masa transisi tinggal satu kredit dengan bunga lunak yaitu kredit ketahanan pangan sejak itu tidak ada lagi sistem pembiayaan melalui mekanisme kredit program, baru pada tahun 2008 ini pemerintah memberikan program kredit yang merupakan hasil kerjasama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR).

Kredit program pada dasarnya merupakan pembiayaan sistem kredit Bank yang diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan. Faktor keterbatasan kemampuan untuk memenuhi persyaratan kredit Bank, merupakan kelemahan UMKM yang dijumpai melalui penyediaan kredit berbunga lunak (*bersubsidi*).

Sebagai suatu sistem, kredit program ini dapat berjalan dan membantu pembiayaan UMKM. Namun ada 2 (dua) titik krusial yang menjadi ciri kredit program yaitu bunga lunak (*subsidi*) dan batas ambang (*threshold*) ukuran tingkat kemampuan UMKM. Penerapan subsidi kredit menciptakan distorsi pasar, tentu saja tidak sejalan dengan sistem pembiayaan yang efisien. Sedangkan batas ambang kemampuan KUKM, sejauh ini parameternya masih samar sehingga tidak ada ujungnya.

Sistem pembiayaan perbankan tetap merupakan sumber pembiayaan utama bagi UMKM. Garis besar pemberian kredit Bank berdasarkan pada aspek kelayakan bisnis (*komersial*) dan sangat minim intervensi aspek non komersial. Sistem dan prosedur serta persyaratan kredit Bank relatif baku. Pemanfaatan kesempatan sangat tergantung pemenuhan persyaratan oleh UMKM (*bankable*).

Dengan berdasarkan pada aspek kelayakan usaha, maka syarat pokok pemanfaatan kredit Bank yaitu dengan melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan di pihak UMKM sendiri. Dalam lingkup seperti ini, maka hanya UMKM yang memiliki usaha layak dan memiliki manajemen dan administrasi rapi yang lebih cepat memanfaatkan peluang kredit Bank. Prasyarat seperti ini yang sering

memperlihatkan hanya sebagian kecil UMKM yang dapat memanfaatkan kredit Bank.

Dengan orientasi pada pertimbangan komersial, maka optimalisasi pemberian kredit untuk UMKM, disentuh melalui jalur kebijakan perbankan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan (*rowing*) pemberian kredit bagi usaha kecil dengan menciptakan skim dan plafond kredit bagi UMKM. Kebijakan ini pernah dirintis melalui kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP). Pada tahun-tahun selanjutnya, skim kredit tersebut menjadi kredit usaha kecil (KUK) yang masih berjalan sampai sekarang dengan sumber pendanaan murni oleh Bank (*bukan subsidi*).

Selain dukungan kebijakan pemerintah, untuk memperluas akses layanan pembiayaan kepada UMKM banyak bank memperluas sistem layanan dengan membuka akses dan *outlet kredit* bagi UMKM. Dengan cara ini maka jalur kredit skala kecil (ritel) dapat ditangani lebih cepat.

Mengingat proses restrukturisasi sektor korporasi dan BUMN berlangsung lambat, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporasi terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi.

Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena kekuatannya dalam menghadapi berbagai persaingan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan semangat usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa depan, jelas sangat memerlukan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan untuk mendukungnya.

Sebagaimana kita ketahui dari berbagai kasus, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- 1) manajemen,
- 2) permodalan,
- 3) teknologi,
- 4) bahan baku,
- 5) informasi dan pemasaran,
- 6) infrastruktur,
- 7) birokrasi dan pungutan,
- 8) kemitraan.

Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan pada Bank Indonesia dan membahasnya dengan judul **“TINJAUAN PERKEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, HOTEL RESTORAN DAN PERTANIAN DI JAWA BARAT”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Trend yang terjadi pada tahun 2006 – 2007 pada Sektor Industri, Sektor Perdagangan Hotel Restoran dan Sektor Pertanian?
2. Mengapa terjadi perubahan Trend pada tahun 2006 – 2007 di setiap sektor tersebut?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui perubahan kredit melalui Trend yang terjadi pada tahun 2006 – 2007.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan kredit melalui Trend pada tahun 2006 - 2007.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Kegunaan yang diharapkan akan diperoleh dari tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Diploma III Akuntansi di Universitas Widyatama dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam rangka menambah wawasan berfikir mengenai perkembangan kredit Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) pada sektor industri, sektor perdagangan hotel restoran dan sektor pertanian di Jawa Barat.
2. Bagi objek yang diteliti, sebagai langkah evaluasi terhadap tingkat rentabilitas terutama pinjaman di setiap sektor.
3. Bagi kepastakaan, untuk menambah koleksi yang diharapkan dapat memberikan tambahan refensi bagi yang memerlukan.
4. Bagi praktisi, untuk memberikan sumbangan informasi terutama para pemerhati bank.

1.5 Metodologi Tugas Akhir

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan mengenai suatu variabel pada saat penelitian di sertai dengan pengukuran-pengukuran atau penilaian atas data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dibahas dan dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode penelitian dengan cara membaca referensi baik berasal dari buku, majalah, surat kabar maupun media cetak lainnya, studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan suatu teori atau hasil penelitian lembaga lain yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu metode penelitian yang langsung terjun menghadapi objek penelitian dengan menguji suatu hipotesa atau teori yang mendasari penelitian untuk keobyektifan data.

1.6 Lokasi dan Waktu Tugas Akhir

Mengacu pada topik permasalahan yang mendasari penyusunan, maka penulis melakukan kerja praktek di Bank Indonesia yang berlokasi di Jl. Braga No.108, Bandung, yang dimulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 3 April tahun 2008.

